

BAB II

TINJAUAN UMUM, KEPEMIMPINAN, PEREMPUAN, KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN PONDOK PESANTREN

A. Kepemimpinan

1. Pengertian kepemimpinan

Kata “ kepemimpinan” terjemahan dari bahasa inggris *leadership*. Kata ini sering terdengar dalam percakapan orang, dalam pertemuan-pertemuan, dari radio, televisi dan lain sebagainya (Karjadi, 1981: 1). Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *khilafah, imarah, ziamah*, atau *imamah*. Secara etimologi, kepemimpinan berarti daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin itu sendiri (Zainudin dan Mustaqim, 2005:1).

Tidak mudah untuk merumuskan definisi kepemimpinan, sebab tergantung dari segi mana meninjaunya (Effendy. 1985: 131), namun demikian sebagai pegangan awal tidak ada salahnya bila secara umum dan populer, kepemimpinan diberi arti di antaranya :

- a. Menurut Joewono (2002: 2) kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendaknya.

- b. Menurut Hoyt yang dikutip Moekiyat (1980: 296) kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia; kemampuan untuk membimbing orang.
- c. Menurut Thoha (1995: 117) kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- d. Kepemimpinan menurut teori Heraty Noerhadi, berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik. Kepemimpinan juga bisa berarti kompetisi dan hirarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab (Melly, 1991: 11).
- e. Menurut Hadari Nabawi, kepemimpinan adalah sebagai suatu pergerakan yang dilakukan dengan kemampuan menetapkan keputusan dan mengkomunikasikannya dengan orang lain sehingga terdorong untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan (Hadari, 1993 : 37).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Caranya dengan membuat *planning*,

organizing, actuating, dan controlling yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai konsep manajemen.

Dari beberapa konsep diatas, konsep yang penulis gunakan adalah konsep Joewono yaitu kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendaknya. Isi konsep ini relevan dengan pertanyaan penelitian ini.

Pada dasarnya seorang pemimpin haruslah memiliki bobot kepemimpinan dengan perilaku positif dan kelebihan–kelebihan tertentu antara lain : a). Beriman dan bertaqwa kepada Allah, b). Kelebihan jasmani dan rohani, c). Berani, terampil, dan berpengetahuan, d). Adil, jujur, bijaksana, dan demokratis, e). Penyantun, paham keadaan ummat, f). Ikhlas berkorban, *qanaah* dan *istiqomah* (Sugeng, 2012: 69).

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Untuk itu, semua manusia mempunyai tugas kepemimpinan secara bersama–sama. Sebab, ruang lingkup kepemimpinan terletak pada tanggungjawab bagi setiap manusia atau tugas–tugasnya di bumi Allah SWT dalam lapangan dan sektor yang beragam.

Kata kunci kepemimpinan terletak pada tugas seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan semata-mata kekuasaan yang kebanyakan berujung pada kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah. Maka, kepemimpinan bukan saja tugas laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan (Nurul, 2008: 65).

Indikator dari kepemimpinan dapat ditandai oleh beberapa ciri sebagai berikut seperti yang dinyatakan oleh Ralp M. Stogdill dalam buku "*Personel Factor Associated With Leadership*" yang dikutip oleh James A. Lee dalam bukunya "*Management Theories and Prescriptions*", menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan :

- 1) Kapasitas, seperti kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau *verbal facility*, kemampuan menilai.
- 2) Prestasi, seperti gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga, dan lain-lain.
- 3) Tanggung Jawab, seperti mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.
- 4) Partisipasi, seperti aktif, memiliki sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.

- 5) Status yang meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer dan tenar (Faizah dan Effendi,2006;165).

Robert B. Myers melakukan studi tentang hal yang sama dengan Ralph M. Stodill dengan menghasilkan kesimpulan :

- 1) Sifat-sifat jasmani manusia tidak ada hubungannya dengan *leadership*.
- 2) Walaupun pemimpin cenderung untuk lebih tinggi dalam kecerdasan dari pada orang yang dipimpinnya, akan tetapi tidak ada hubungan yang berarti antara kelebihan kecerdasan tersebut dengan soal kepemimpinan tersebut.
- 3) Pengetahuan yang dimanfaatkan untuk memecahkan problem yang dihadapi kelompok yang dipimpin merupakan bantuan yang sangat berarti pada status kepemimpinan.
- 4) Ciri dan watak yang mempunyai korelasi dengan kepemimpinan adalah ; kemampuan melihat problem yang dihadapi, inisiatif, kerja sama, ambisi, ketekunan, emosi yang stabil, popularitas, dan kemampuan berkomunikasi (Arifin, 2000: 93).

2. Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara meliputi:

“Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut : “Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan”. Konsep yang sudah berumur puluhan tahun ini ternyata masih relevan diterapkan dalam gaya kepemimpinan saat ini.

a. *Ing Ngarso Sung Tolodho*

Seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan yang dapat dicontoh oleh pengikutnya. Dia harus berdiri di depan dalam memberikan contoh nyata agar dapat di ikuti oleh pengikutnya. Seorang pemimpin harus mampu menguasai bidang pekerjaannya.

Selain dari sisi pengetahuan teknis, kematangan pribadi dan sikap harus diperhatikan karena tingkah laku sang pemimpin selalu menjadi perhatian bawahannya. Baik dari sisi moral dan akhlak, pergaulan, bahkan kehidupan keluarganya pun akan menjadi panutan bagi bawahannya.

b. *Ing Madya Mangun Karsa*

Membangun motivasi dan semangat berkarya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Selain harus mampu membaca situasi dan keadaan perusahaannya, pemimpin yang baik harus dapat mengelola SDM yang dimilikinya agar dapat bekerja

secara optimal. Membangun semangat kebersamaan (team building) dan mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan tentang visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan adalah hal wajib bagi pemimpin. Sampaikan target dan sasaran utama dan langkah apa yang akan dijalankan, dan ajak seluruh karyawan untuk mencapainya. Dengan membangun rasa kekeluargaan dan rasa memiliki perusahaan, diharapkan seluruh karyawan akan bekerja sekuat tenaga dan berhati-hati.

c. *Tut Wuri Handayani*

Memberikan dorongan semangat dan memfasilitasi kebutuhan bawahannya untuk mencapai target akan sangat dihargai oleh karyawannya. Bagaimanapun yang paling sering turun ke lapangan dan bertemu dengan customer adalah para karyawan atau bawahan. Penuhi kebutuhannya, berdayakan mereka dan beri bekal dalam bentuk pelatihan. Jika karyawan sudah mampu menjalankan tugas dengan baik dan sesuai visi perusahaan, tentu target dan sasaran kerja dapat dicapai dengan maksimal.

3. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Dalam prakteknya, tipe kepemimpinan ini sangat bervariasi dan terdapat banyak pendapat dan tinjauan tentang tipe kepemimpinan tersebut. Meskipun belum ada

kesepakatan mengenai tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal dewasa ini, terdapat lima tipe kepemimpinan yang umum digunakan, yaitu:

a. Tipe Kharismatik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa “kharismatik bersifat karisma”. Sedang perkataan karisma diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Atau karisma dapat juga diartikan atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu (Nawawi, 1993: 103).

Tipe kharismatik ini diwarnai oleh indikator sangat besarnya pengaruh sang pemimpin terhadap para pengikutnya. Kepemimpinan seperti ini lahir karena pemimpin tersebut mempunyai kelebihan yang bersifat psikis dan mental serta kemampuan tertentu, sehingga apa yang diperintahkannya akan dituruti oleh pengikutnya. Biasanya dalam kepemimpinan kharismatik ini interaksi dengan lingkungan lebih banyak bersifat informal, karena dia tidak perlu diangkat secara formal dan tidak ditentukan oleh kekayaan, tingkat usia, bentuk fisik, dan sebagainya. Meskipun demikian, kepercayaan terhadap dirinya sangat tinggi dan para pengikutnya pun mempercayainya dengan

penuh kesungguhan, sehingga dia sering dipuja dan dipuji bahkan dikultuskan. Sebab dalam kesehariannya dengan kewibawaannya yang cukup besar, dia mampu mengendalikan pengikutnya tanpa memerlukan dari pihak lain (Kayo, 2005: 57).

b. Tipe Paternalistik

Tipe kepemimpinan paternalistik berorientasi pada penyelesaian tugas (*result oriented*) serta memelihara komunikasi dan hubungan baik dengan bawahannya (hubungan antara bapak dengan anak-anaknya), sehingga tipe ini sering disebut dengan tipe kepemimpinan yang kebabakan, dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/ belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan
- 2) Bersikap terlalu melindungi (*overly protective*)
- 3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri
- 4) Hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif
- 5) Tidak memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada pengikut dan bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri

- 6) Selalu bersikap maha-tahu dan maha-benar (Kartono, 2006: 81-82).

Tipe pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Popularitas pemimpin yang paternalistik di lingkungan masyarakat demikian mungkin sekali disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kuatnya ikatan primordial
- 2) “*extended family system*”
- 3) Kehidupan masyarakat yang komunalistik
- 4) Peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat
- 5) Masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya (Siagian, 1989: 34).

c. Tipe Militeris

Tipe kepemimpinan militeris ini dapat dikatakan sifatnya kemiliter-militeran. Hanya gaya luarnya saja yang mencontoh gaya militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter. Hendaknya dipahami, bahwa tipe kepemimpinan militeris itu berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer (seorang tokoh militer). Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeris antara lain:

- 1) Lebih banyak menggunakan sistem perintah/komando terhadap bawahannya, keras, otoriter, kaku, dan seringkali kurang bijaksana
- 2) Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan
- 3) Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan
- 4) Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya
- 5) Tidak menghendaki, saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya
- 6) Komunikasi hanya berlangsung searah saja (Kartono, 2006: 82-83).

d. Tipe Otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis atau otoriter menempatkan kekuasaan di tangan pemimpin (penguasa tunggal). Posisi bawahan hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan pelaksana apa yang diinginkan pimpinan. Pemimpin memandang dirinya tidak memiliki kelemahan dan kekurangan. Potensi yang dimiliki bawahannya dianggap rendah, sehingga mereka dipandang tidak mampu berbuat apa-apa (Torang, 2013: 66).

Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan otokratis

tidak melibatkan orang lain atau bawahannya, melainkan bertindak sendiri. Bawahannya hanya diharapkan melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh pemimpinnya. Dalam berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan bawahannya, pemimpin dengan tipe ini menggunakan pendekatan formal sesuai dengan jabatan dan perannya.

Adapun sifat-sifat yang dimiliki pemimpin dengan tipe kepemimpinan otoriter antara lain:

- 1) Kurang mempercayai bawahan/ anggota kelompoknya
- 2) Bersikap otoriter
- 3) Menganggap bahwa hanya dengan imbalan materi sajarah yang mampu mendorong orang untuk bertindak
- 4) Kurang toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan bawahan/ anggota kelompok
- 5) Peka terhadap perbedaan kekuasaan
- 6) Kurang perhatian kepada bawahan/anggota kelompoknya
- 7) Memberikan kesan seolah-olah demokratis
- 8) Mendengarkan pendapat bawahan/ anggota kelompoknya semata-mata hanya untuk menyenangkan

9) Senantiasa membuat keputusan sendiri (Rivai, 2004: 79).

e. Tipe Demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis dalam organisasi menempatkan bawahan sebagai faktor utama dan terpenting. Seorang pemimpin menempatkan bawahannya sebagai subjek yang memiliki keinginan, kebutuhan, kemampuan, pendapat, kreativitas, dan inisiatif yang berbeda-beda dan harus dihormati. Tipe kepemimpinan demokratis mengindikasikan kepemimpinan yang aktif, dinamik, dan terarah. Dalam mengambil keputusan, tipe demokratis selalu mengedepankan musyawarah (Torang, 2013: 67-68).

Kepemimpinan demokratik adalah tipe kepemimpinan yang paling ideal untuk dikembangkan dalam organisasi yang modern. Pertimbangannya adalah karena lebih cocok dengan fitrah manusia dan mudah untuk diterapkan dalam semua lapisan, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota.

Secara filosofis, corak kepemimpinan demokratis akan tergambar dalam tindakan dan perilaku pemimpinnya, antara lain sebagai berikut:

1) Pemimpin menghargai pengikutnya secara menyeluruh tanpa membedakan

- 2) Pengambilan keputusan sangat berorientasi kepada keputusan kelompok, bukan hasil pemikiran dari seorang pemimpin saja
 - 3) Pola dialog menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan inisiatif kelompok
 - 4) Tugas dan wewenang disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang tersedia
 - 5) Memberi peluang yang luas kepada bawahan untuk berkembang sesuai dengan skills-nya
 - 6) Selalu mengatakan bahwa keberhasilan yang dicapai adalah keberhasilan bersama (kelompok)
- (Kayo, 2005: 63).

4. Ciri-Ciri Pemimpin

Ralp M. Stogdill dalam buku "*Personel Factor Associated With Leadership*" yang dikutip oleh James A. Lee dalam bukunya "*Management Theories and Prescriptions*", menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan :

- a. Kapasitas, seperti kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau *verbal facility*, kemampuan menilai.
- b. Prestasi, seperti gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olah raga, dan lain-lain.

- c. Tanggung Jawab, seperti mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.
- d. Partisipasi, seperti aktif, memiliki sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor.
- e. Status yang meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer dan tenar (Faizah dan Effendi,2006;165).

Robert B. Myers melakukan studi tentang hal yang sama dengan Ralph M. Stodill dengan menghasilkan kesimpulan :

- a) Sifat-sifat jasmani manusia tidak ada hubungannya dengan *leadership*.
- b) Walaupun pemimpin cenderung untuk lebih tinggi dalam kecerdasan daripada orang yang dipimpinnya, akan tetapi tidak ada hubungan yang berarti antara kelebihan kecerdasan tersebut dengan soal kepemimpinan tersebut.
- c) Pengetahuan yang dimanfaatkan untuk memecahkan problem yang dihadapi kelompok yang dipimpin merupakan bantuan yang sangat berarti pada status kepemimpinan.
- d) Ciri dan watak yang mempunyai korelasi dengan kepemimpinan adalah ; kemampuan melihat problem

yang dihadapi, inisiatif, kerja sama, ambisi, ketekunan, emosi yang stabil, popularitas, dan kemampuan berkomunikasi (Arifin, 2000: 93).

Menurut Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, terdapat ciri-ciri yang harus dimiliki pemimpin secara umum, antara lain :

a. Persepsi Sosial (*sosial perception*)

Yang dimaksud dengan persepsi sosial adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan, sikap, kebutuhan anggota kelompok. Persepsi sosial diperlukan untuk melaksanakan tugas pemimpin sebagai penyambung lidah anggota kelompoknya dan memberikan patokan yang menyeluruh tentang keadaan di dalam maupun di luar kelompok.

b. Kemampuan berfikir abstrak (*ability in abstract thinking*)

Kemampuan berfikir abstrak diperlakukan dalam menafsirkan kecenderungan kegiatan di dalam kelompok dan keadaan diluar kelompok dalam hubungannya dengan realitas tujuan-tujuan kelompok. Untuk itu ketajaman penglihatan dan kemampuan analitis yang didampingi oleh kemampuan mengabstraksi dan mengintegrasikan fakta-fakta interaksi sosial di dalam maupun diluar kelompok.

Kelompok tersebut memerlukan adanya taraf intelegensia yang tinggi pada seorang pemimpin.

c. Kestabilan emosi (*emotional stability*)

Pada dasarnya harus terdapat suatu kematangan emosional yang berdasarkan pada kesadaran yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan, cita-cita serta pengintegrasian semua kedalam kepribadian yang bulat dan harmonis. Kematangan emosi diperlukan untuk dapat merasakan keinginan dan cita-cita anggota kelompok secara nyata dan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan yang lain secara wajar (Gerungan, 1991: 135).

5. Sifat-sifat pemimpin

Dalam kepemimpinan Islam menawarkan konsep tentang perilaku seorang pemimpin sebagaimana yang terdapat dalam pribadi para Rosul. Yang mana kepemimpinan Nabi/Rasul ditunjang dengan sifat – sifat terpuji. Adapun sifat – sifat para Nabi dan Rasul adalah ;1). Jujur (*shiddiq*), 2). Dapat dipercaya (*amanah*), 3). Menyampaikan (*tabligh*), 4). Cerdas (*fathanah*). Sifat/karakteristik diatas dijelaskan sebagai berikut:

a. *Shiddiq*

Adalah sifat/karakteristik Nabi Muhammad SAW yang berarti benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil

keputusan–keputusan yang menyangkut visi dan misi, efektif dan efisien dalam implementasi serta operasionalnya di lapangan.

b. *Amanah*

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan *credible*. Amanah juga bisa bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu dengan ketentuan. Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Sifat/karakteristik amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

c. *Tabligh*

Sifat/karakteristik tabligh artinya komunikatif dan argumentative. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (*bi al hikmah*) yang berarti berbicara dengan orang lain dengan suatu yang mudah dipahami dan diterima oleh akal, bukan berbicara yang sulit dimengerti.

d. *Fathanah*

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan dan kebijaksanaan. Sifat/karakteristik ini dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan

untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.

Pada dasarnya seorang pemimpin haruslah memiliki bobot kepemimpinan dengan perilaku positif dan kelebihan-kelebihan tertentu antara lain : a). Beriman dan bertaqwa kepada Allah, b). Kelebihan jasmani dan rohani, c). Berani, terampil, dan berpengetahuan, d). Adil, jujur, bijaksana, dan demokratis, e). Penyantun, paham keadaan ummat, f). Ikhlas berkorban, *qanaah* dan *istiqomah* (sugeng, 2012: 69).

B. Perempuan

Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan *أُنثَى - أُنثَى - أُنثَى* berarti lemah gemulai, *anatsat al-hamil* berarti perempuan melahirkan, *anatsa fi al-amr* berarti lembek dan tidak tegas, *hadid anit* berarti besi lunak, *sayf anits* berarti pedang pipih, *rajul anits* artinya laki-laki yang lembut dalam berbicara (Abdul Qadhir Mansyur, 2005: 22).

Menurut sudut kebahasaan, perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki-laki sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Karena itu, seorang laki-laki yang berperilaku kewanita-wanitaan bisa dikatakan sebagai perampasan hak orang lain. Sebab, laki-laki harus memiliki perangai tersendiri seperti halnya perempuan (*ibid*).

Perempuan adalah jenis manusia tertentu yang diciptakan Allah SWT firman-Nya, “ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.” (Al-Baqarah [2]: 31).

Kalangan fukaha pernah menyebutkan, kaum perempuan memiliki ciri-ciri khusus selain struktur fisik yang membedakannya dengan laki-laki. Ciri-ciri itu adakalanya kasatmata seperti menstruasi, dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatrit dalam diri setiap perempuan.

Dalam Al-Qur’an, kata *untsa* disebutkan dalam beberapa konteks berbeda. Satu sisi berkaitan dengan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam beramal serta mendapatkan pahala dari Allah, disisi lain mengulas perbedaan spesifik keduanya dari sisi kehamilan yang dialami perempuan dan kisah-kisah seputar perempuan yang mengisyaratkan perbedaan dari mereka dengan kaum laki-laki (Abdul Qodhir Manshur, 2005: 22-23).

Perempuan adalah jenis manusia tertentu yang diciptakan Allah SWT firmannya-Nya, “ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.” (Al-Baqarah [2]: 31).

Kalangan fukaha pernah menyebutkan, kaum perempuan memiliki ciri-ciri khusus selain struktur fisik yang membedakannya dengan laki-laki. Ciri-ciri itu adakalanya kasatmata seperti menstruasi, dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatrit dalam diri setiap perempuan.

Dalam Al-Qur’an, kata *untsa* disebutkan dalam beberapa konteks berbeda. Satu sisi berkaitan dengan persamaan hak

perempuan dan laki-laki dalam beramal serta mendapatkan pahala dari Allah, disisi lain mengulas perbedaan spesifik keduanya dari sisi kehamilan yang dialami perempuan dan kisah-kisah seputar perempuan yang mengisyaratkan perbedaan dari mereka dengan kaum laki-laki (Abdul Qodhir Manshur, 2005: 22-23).

Sebenarnya, Islam telah memuliakan kaum perempuan dan mengakui kemanusiaannya, serta kecakapannya untuk melaksanakan perintah, memikul tanggung jawab, mendapatkan balasan dan masuk surga, dan menganggapnya sebagai manusia mulia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, karena keduanya adalah cabang dari satu pohon, keduanya bersaudara, ayah dan ibunya satu yaitu Adam dan Hawa.

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba Allah. Sama dalam berbagai hal, seperti:

a. Keduanya sama dalam asal-usulnya

Bahwa perempuan dan laki – laki berasal dari satu keturunan yang sama.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dengan demikian, perempuan dan laki-laki adalah berasal dari cabang yang berasal dari satu pohon, mereka bersaudara ayah ibunya satu yaitu Adam dan Hawa. Baik laki – laki maupun perempuan semuanya diciptakan dari satu jiwa.

- b. Keduanya sama dalam mendapatkan taklif dan tanggung jawab syariat atas tindakan yang dilakukannya. Karena kebebasan tidak ada nilainya tanpa tanggung jawab.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqoroh ayat 35 :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya : *Dan Kami berfirman, ” hai adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makan – makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kammu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang – orang yang zhalim.” (Al-Baqoroh: 35).*

- c. Keduanya sama dalam mendapatkan balasan dan hukuman atas perbuatannya.

Allah berfirman dalam surat Ali Imron ayat 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
 ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

التَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan firman), sesungguhnya Aku tidak menyia – nyiakan amal orang – orang yang beramal diantara kamu, baik laki – laki ataupun perempuan.”* (Ali Imron: 195).

Dengan tiga hal tersebut, Islam telah menyempurnakan kepribadian perempuan dari segala aspek dan memberinya semua hak – haknya (Sa’dawi, 2009: 65-66).

Islam telah memuliakan wanita, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam kedudukannya sebagai manusia. Islam telah memuliakan perempuan, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam kedudukannya sebagai perempuan. Islam telah memuliakan perempuan, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam kedudukannya

sebagai anak perempuan. Islam telah memuliakan perempuan, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam statusnya sebagai isteri. Islam telah memuliakan perempuan, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam status sebagai ibu. Islam telah memuliakan perempuan, memperlakukannya secara adil, dan melindunginya dalam statusnya sebagai bagian dari anggota masyarakat (Amru, 2009: 63).

Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level manapun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apapun, baik sebagai pemimpin pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Jika banyak perdebatan tentang absah tidaknya kaum perempuan menjadi pemimpin, secara syar'i, tentu kita harus merujuk kepada pemahaman pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa: 34, At-Taubah:71, dan An-Naml: 44 yang sudah peneliti sebutkan dalam paragraf di depan. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak lain adalah sebagai kerangka normatif yang cukup ideal untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Untuk itulah, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan aturan sosial, tentu bersifat universal. Disinilah

umat Islam mempunyai tugas untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan dalam konteks kenyataan sosial yang mutakhir (Nurul, 2008: 66).

C. Kepemimpinan perempuan

Kepemimpinan menurut Joewono (2002: 2) kepemimpinan diartikan sebagai suatu cara dan metode seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendak-Nya.

Perempuan menurut Abdul Qadhir Mansyur (2005:22-23) diartikan sebagai jenis manusia tertentu yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki ciri menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh jenis manusia ciptaan Allah SWT yang memiliki ciri-ciri menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui yang dapat mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut dengan sadar mengikuti dan mematuhi segala kehendaknya.

Kata kunci kepemimpinan terletak pada tugas seseorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan semata-mata kekuasaan yang kebanyakan berujung pada kemudahan fasilitas dan kemudahan mengakses kebijakan secara cepat dan mudah.

Maka, kepemimpinan bukan saja tugas kaum laki-laki, akan tetapi juga kaum perempuan. Perempuan juga mempunyai tanggung jawab kepemimpinan pada level mana pun. Setiap orang bisa menjadi pemimpin pada level apa pun, baik sebagai pemimpin pemerintahan, lembaga, maupun masyarakat. Bahkan, juga dapat menjadi pemimpin perang sekalipun, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan (Mubin, 2008: 65-66).

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi kaum laki-laki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya (Shihab, 2005: 376).

Peran domestik perempuan yang sifatnya kodrati seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Akan tetapi, dalam peran publik, perempuan sebagai anggota masyarakat dan atau sebagai warga negara, mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, berpolitik, dan melakukan peran sosialnya yang lebih tegas dan transparan. Dalam peran publik ini, menurut Islam diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia

dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran-peran itu. Dalam peran publik, perempuan memiliki berbagai aktivitas yang bersifat peran sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya (Suhandjati, 2010: 3).

Dalam ranah domestik, yaitu urusan rumah tangga, bukan hanya kaum laki-laki saja yang menjadi pemimpin, kaum perempuanpun juga memiliki tugas memimpin urusan rumah tangganya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

“Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga” (HR. Abu Hurairah) (Indra dkk, 2004: 6).

Pandangan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga gencar disuarakan oleh kaum feminis. Perspektif Feminis terdiri dari beberapa golongan, yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, Feminisme Radikal, dan Feminisme Sosialis. Golongan Feminisme Liberal mengasumsikan bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan atas dasar kesamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional. Bagi mereka, pusat masalahnya adalah perbedaan antara pola-pola tradisional dan modern. Kehidupan modern menuntut karakter manusia yang ekspresif yaitu rasional, kompetitif, dan mampu mengubah keadaan dan lingkungannya. Sementara kehidupan tradisional

ditandai dengan karakter yang sebaliknya. Nilai-nilai tradisional inilah yang menyebabkan perempuan tidak bisa bersaing secara adil dengan laki-laki, karena potensi perempuan dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Aturan yang adil adalah dengan membebaskan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan dan menyajarkannya dengan laki-laki (Muslikhati, 2004: 32). Golongan Femenisme Liberal ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan di dalam berbagai peran, seperti dalam sosial, ekonomi, dan politik (Umar, 1999: 65).

Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti pria jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Fokus gerakan ini berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan, bagaimana pranata keluarga dikaitkan dengan sistem kapitalisme, bagaimana pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga tidak dianggap penting dan dianggap bukan pekerjaan, bagaimana

para perempuan itu jika terjun dalam pasar tenaga kerja diberi pekerjaan yang membosankan dan memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pria (Ihromi, 1995: 89).

Feminisme Radikal berpendapat bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain karena laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan. Dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menuntut mereka, merupakan suatu model konseptual yang bisa menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain. Menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan nilai-nilainya (Saptari, 1997: 48).

Feminisme Sosialis mengasumsikan bahwa hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan sebagai perempuan. Selain di negara-negara kapitalis, di negara-negara sosialis, para perempuannya juga terjun dalam pasaran tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Namun, dalam kenyataannya mereka masih hidup dalam kungkungan sistem patriarki (Ihromi, 1995: 105).

Sedangkan kaum feminis Muslim secara umum sepakat bahwa sistem patriarkal yang sudah begitu mengakar di

masyarakat memang dipengaruhi oleh doktrin agama yang mensubordinatkan perempuan di bawah superioritas laki-laki. Pandangan ini memang bisa jadi benar tetapi pada saat yang sama bisa juga salah. Sebab dalam tradisi doktrin Islam sendiri, ide egalitarianisme Al-Qur'an yang menjunjung tinggi persamaan laki-laki dan perempuan seringkali berbenturan dengan sifat ordiner masyarakat Islam yang cenderung patriarkhal. Al-Qur'an pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya kadangkala landasan normatif dan ideal ini berhadapan dengan realitas sejarah yang nyata-nyata berseberangan dengan Al-Qur'an (Jamhari, 2003: 70).

Dalam dunia Islam, gerakan feminisme juga telah berkembang dan menjadi wacana bagi beberapa feminis Muslim. Feminis Muslim dunia seperti Rifaat Hassan, Fatima Mernissi, Nawal Sadawi, Amina Wadud Muhsin, dan beberapa feminis Muslim dari Indonesia seperti Wardah Hafidz, Lies Marcoes Natsir, Siti Ruhaini, dan Nurul Agustina berusaha membongkar berbagai macam pengetahuan normatif yang bias kepentingan laki-laki, khususnya menyangkut relasi gender. Mereka menyadari bahwa banyak hukum agama, misalnya hukum personal keluarga, praktek keagamaan, dan termasuk pula soal keabsahan kepemimpinan sosial-politik apalagi keagamaan bagi perempuan, disusun berdasarkan asumsi patriarkhi (Dzuhayatin, 2002: 34).

Pusat persoalan-persoalan yang didiskusikan oleh para feminis Muslim adalah berbagai hukum yang oleh para ahli hukum klasik diklaim sebagai hukum yang dilandasi ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an. Kebanyakan yang didiskusikan dalam hal ini adalah hukum-hukum mengenai status personal, termasuk poligami, hukum fisik oleh suami terhadap istri, perceraian sepihak diluar hukum oleh suami, mas kawin, hak memelihara anak, tunjangan anak, hukum waris, tatacara berpakaian, dan akses perempuan ke ruang-ruang publik serta kantor-kantor umum, terutama kantor (atau jabatan) kepala negara. Yang lebih baru lagi, beberapa komunitas telah mulai mengangkat persoalan kepemimpinan ibadah, khususnya sebagai imam sholat berjama'ah di hari Jum'at (Baidhawy, 1997: 6).

Tanggapan-tanggapan terhadap persoalan di atas bisa digolongkan menjadi:

1. Tanggapan Apologis

Tanggapan ini meyakini bahwa Islam sebagaimana tersurat dalam Kitab Allah SWT dan contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi memberikan semua hak yang diperlukan oleh kedua jenis kelamin manusia bagi kesejahteraan dan pemenuhan pribadi masing-masing. Tanggapan ini memuat dua perbedaan. Pertama, ada perbedaan yang tidak bisa dipungkiri antara kebutuhan dan keinginan laki-laki dengan kebutuhan dan keinginan perempuan yang dipahami dan dilayani oleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kedua, praktik umu

dalam berbagai komunitas Muslim menyalahi atau tidak memenuhi seluruh hak bagi perempuan sebagaimana telah tersurat dalam teks-teks otoritatif (Al-Qur'an dan hadits) (Baidhaw, 1997: 7).

2. Tanggapan Reformis

Bagi para Reformis, kata-kata Allah SWT telah disalahpahami secara tidak memadai dan/atau disalahtafsirkan. Mereka menggunakan argumen-argumen filosofis dan kontekstual untuk menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an, namun mereka lebih sadar akan kebutuhan untuk menafsirkan kembali sekaligus sadar akan keterlibatan diri mereka dalam kegiatan semacam itu sementara para Reformis dapat mempertanyakan atau menggugat tafsiran-tafsiran tradisional, mereka tidak mempertanyakan keyakinan tradisional bahwa Al-Qur'an adalah kata-kata Allah SWT sendiri, bukan buatan manusia (Baidhaw, 1997: 8).

3. Tanggapan Transformatif

Tanggapan ini berniat untuk memperbaharui tradisi secara menyeluruh, selagi masih tetap berada di dalam kerangka kerja wacana Islami yang dirumuskan secara tradisional. Mereka menggunakan berbagai strategi *hermeneutis* klasik untuk menciptakan ruang penafsiran dan untuk mempertemukan berbagai pertentangan yang muncul, hal-hal yang membingungkan, atau tegangan-tegangan di dalam teks itu (Baidhaw, 1997: 9).

4. Tanggapan Rasionalis

Salah satu feminis Rasionalis adalah Rifaat Hassan. Ia menyatakan bahwa karena Allah Maha Adil dan Maha Pengasih, maka kata-kata-Nya hanya bisa ditafsirkan dalam istilah-istilah yang selaras dengan kualitas-kualitas Ilahi tersebut. Pandangan tersebut berarti menerapkan kriteria keadilan kepada Al-Qur'an, dari pada sekedar menerima begitu saja bahwa Al-Qur'an pastilah adil. Atau, ia mengambil pandangan tentang keadilan yang dikembangkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, serta menggunakannya untuk menilai ayat-ayat lain yang tampaknya mengguncangkan pandangan tentang keadilan itu (Baidhaw, 1997: 11).

5. Tanggapan Rejeksioni

Tanggapan ini merupakan tanggapan ekstrim yang rela mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk menyatakan kewenangan Al-Qur'an dalam mendeskripsikan perempuan. Bagi mereka, titik rujukannya adalah pengalaman perempuan, dan argumen apapun di luar itu, tak peduli dari manapun sumbernya, yang mendukung penindasan terhadap perempuan, akan ditolak (Baidhaw, 1997: 13).

Kepemimpinan perempuan tidak hanya terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas dalam upaya mempengaruhi kaum lelaki agar mengakui hak-

haknya yang sah, tetapi juga harus mencangkup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya (Shihab, 2005: 376).

Salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik adalah adanya kemampuan untuk turut mengambil keputusan. Tanpa adanya keberanian dan penggunaan kesempatan yang didukung oleh kemampuan serta kemauan perempuan itu sendiri, kepemimpinan perempuan dalam bidang kehidupan tak banyak berarti (Tan, 1996: 29).

Dalam medan politik dan hukum, Imam Abu Hanifah memperkenankan perempuan menjadi pemimpin dalam hal-hal yang menjadi urusannya, yakni selain masalah pidana. Adapun Imam Thabari dan Ibnu Hazm memperbolehkannya menjadi pemimpin dalam bidang apapun (Takariawan, 2010: 271).

Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa perempuan boleh bekerja atau menjadi pemimpin dengan catatan:

- a) Tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu
- b) Mendapatkan izin dari suami

- c) Tidak bekerja di tempat yang laki-laki dan perempuan saling berbaur
- d) Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian seorang muslimah
- e) Senantiasa menjaga aurat dan kesucian dirinya (Afra, 2008:345).

Kepemimpinan perempuan dalam segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya pada semua tingkat internasional, regional, nasional, masyarakat dan keluarga masih belum dapat dikatakan mantap. Dalam banyak hal status perempuan dalam kehidupan sosial masih mengalami diskriminasi, perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan dalam ranah publik lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan sendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, dimana perempuan diharapkan memiliki peranan yang lebih kuat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan (Suhandjati, 2010: 14).

Hambatan lain yang sering dikutip untuk kemajuan perempuan adalah perbedaan *gender* yang diasumsikan ada dalam komitmen pada pekerjaan dan motivasi untuk memimpin. Klaim ini menegaskan bahwa laki-laki lebih mungkin memiliki sifat yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif dibandingkan perempuan. *Stereotip gender* menggambarkan keyakinan yang bersifat pelabelan tentang

sifat perempuan, dimana laki-laki dianggap memiliki *stereotip* karakteristik pengontrol, seperti keyakinan diri, ketegasan, kemandirian, rasionalitas, dan kepastian. Sementara itu, perempuan dianggap memiliki karakteristik *komunal*, seperti peduli kepada orang lain, peka, hangat, suka menolong, dan membimbing (Northouse, 2013: 337). Sehingga, hal ini akan menyebabkan penilaian yang bias terhadap perempuan, dimana perempuan dianggap tidak efektif dalam memimpin.

Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, perempuan menunjukkan jumlah yang lebih besar dalam posisi kepemimpinan puncak. Dengan perubahan norma di tempat kerja dan peluang pengembangan untuk perempuan; kesetaraan gender yang lebih besar di pekerjaan rumah tangga; kekuatan negosiasi perempuan yang lebih besar, terutama terkait dengan keseimbangan pekerjaan rumah tangga; keefektifan dan banyaknya perempuan yang menjadi wirausaha; serta perubahan dalam ketidakselarasan antara perempuan dan kepemimpinan, akan dapat dilihat lebih banyak perempuan dalam peran kepemimpinan yang elit (Northouse, 2013: 342).

Dalam medan politik dan hukum, Imam Abu Hanifah memperkenankan perempuan menjadi pemimpin dalam hal-hal yang menjadi urusannya, yakni selain masalah pidana. Adapun Imam Thabari dan Ibnu Hazm memperbolehkannya

menjadi pemimpin dalam bidang apapun (Takariawan, 2010: 271).

Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa perempuan boleh bekerja atau menjadi pemimpin dengan catatan: tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu, mendapatkan izin dari suami, tidak bekerja di tempat yang laki-laki dan perempuan saling berbaur, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian seorang muslimah, senantiasa menjaga aurat dan kesucian dirinya (Afra, 2008: 345).

Sejak abad 15 silam Islam, Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya adalah masalah kepemimpinan, Al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: 49).

Melihat uraian diatas kepemimpinan tidak hanya dipegang dan berhasil di tangan kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Selama ini gender merupakan atribut yang

melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sebagai konsep dalam analisis gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentuk budaya (Ema Marhumah, 2011: 3).

Secara garis besar, teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya dengan perempuan, menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, lebih produktif. Di sisi lain, organ reproduksi perempuan beserta fungsinya yang diasosiasikan kepadanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikonalisis.

Kedua, kelompok teori *nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan

perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis (Ema Marhumah, 2011: 4-5).

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan maka tidak bisa terlepas dari kepemimpinan laki-laki, perbedaan kepemimpinan perempuan dan laki-laki antara lain; Menurut Schermerhorn (1999), pemimpin wanita selalu lebih cenderung untuk bertingkah laku secara demokratik dan mengambil bagian dimana mereka lebih menghormati dan prihatin terhadap pekerjaanya/bawahannya dan berbagi 'kekuasaan' serta perasaan dengan orang lain. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai kepemimpinan interaktif yang menekankan aspek keseluruhan dan hubungan baik melalui komunikasi dan persepsi yang sama.

Secara perbandingan, pemimpin lelaki lebih cenderung ke arah kepemimpinan "tendency". Dengan cara ini mereka lebih terarah untuk tetap terjaga dan berkelakuan secara "asertif". Jika keadaan ini terjadi, maka mereka lebih banyak menggunakan otoritas dari segi tradisional dengan kecenderungan memberi arahan dan

nasehat yang lebih banyak. Kajian yang dijalankan oleh Sharpe (2000) mendapati bahwa wanita selalu lebih mementingkan hubungan interpersonal, komunikasi, motivasi pekerja, berorientasi tugas, dan bersikap lebih demokratis dibandingkan dengan lelaki yang lebih mementingkan aspek perancangan strategik dan analisa.

Gaya kepemimpinan perempuan lebih cenderung melakukan pendekatan yang mengajak bawahan untuk ikut maju berkembang dalam pemikiran dan pemimpin ikut terjun di dalam melaksanakan tugas agar mencapai tujuan, sedangkan berbeda dengan kaum laki-laki yang memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung hanya hubungan atasan dan bawahan yang dimana bawahan melakukan apa yang diperintahkan oleh atasan tanpa adanya pendekatan emosional antara bawahan dan atasan.

Secara umum, gaya kepemimpinan lelaki dan wanita adalah sama tetapi situasinya yang akan mungkin berbeda. Penelitian dilakukan di Amerika serikat, mendapati bahwa pemimpin lelaki lebih berkesan di dalam organisasi ketentaraan, sementara wanita dalam organisasi pendidikan dan sosial.

D. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren sering juga disebut sebagai “ *pondok pesantren* ” yang berasal dari kata “ *santri* ” mendapatkan awalan “ *pe* ” dan akhiran “ *an*”, yang berarti tempat tinggal para santri (Dhofier, 1994: 18). Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian pesantren adalah asrama dan murid-murid belajar mengaji (Poerwadarminto, 1999: 746). Mengenai asal kata santri itu sendiri terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli. Manfred Ziemik (1986: 16) menyebutkan bahwa asal mula etimologi dari pesantren adalah *pe – santri – an*, “tempat santri”. Santri atau murid mendapatkan pelajaran dari pengasuh pesantren (kyai) serta para guru (ulama atau ustadz) dan materi pelajarannya mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam.

Saat sekarang pengertian yang populer dari pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian (*tafaquh fi ad - din*) dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat (Daulay, 2001: 8). Pendapat lain menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaquh fi ad - din*) dengan terus menerus menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman

hidup bermasyarakat sehari-hari. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren terbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan Kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama dan para ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah para santri dengan masjid sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan. Sedangkan gedung-gedung sekolah atau ruangan belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri dan para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar (Mastuhu, 1994: 6).

Oleh karena itu pengertian atau *ta'rif* pondok pesantren tidak dapat diberikan dengan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang diberikan pengertian pondok pesantren, setidaknya ada 5 (lima) ciri yang terdapat dalam suatu lembaga pondok pesantren, yakni: kyai, santri, pengajian, asrama, dan masjid dengan aktivitasnya (Depag, 2003: 40).

Sementara itu dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Sebenarnya penggunaan penggabungan kedua istilah secara integral yakni pondok dan pesantren menjadi pondok pesantren lebih mengakomodasikan karakter keduanya. Pondok pesantren menurut M. Arifin (1991: 240) berarti, suatu lembaga pendidikan agama Islam

yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dan leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

2. Sejarah pondok pesantren

Berdirinya sebuah pesantren tidak lepas dari adanya seorang ulama yang dalam masyarakat jawa disebut Kiai. Kiai tersebut biasanya menguasai beberapa/suatu bidang tertentu tentang agama Islam. Keahlian yang dimiliki Kiai tersebut kemudian menjadi kajian yang khas di pesantren yang dipimpinnya.

Istilah "Kiai" memiliki pengertian yang *plural*. Kata Kiai berarti sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam).

Menurut kata asalnya, perkataan Kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

- a. Sebutan gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat umpamanya, Kiai garuda kencana dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin

pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar Kiai, ia juga sering disebut 'alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).

Dahulu orang memandang seseorang yang pandai dibidang agama Islam baru layak disebut Kiai bila ia mengasuh atau memimpin pesantren. Sekarang, meskipun tidak memimpin pesantren, bila ia memiliki keunggulan dalam menguasai ajaran-ajaran Islam dan amalan-amalan ibadah sehingga memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, sering juga disebut Kiai.

Pemakaian istilah "Kiai" tampaknya merujuk pada kebiasaan daerah. Pemimpin pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah disebut Kiai, sedang di Jawa Barat diberi gelar "*ajengan*". Pararel dengan Kiai adalah ulama', yang merupakan istilah yang ditransfer dari dua sumber scriptural al-Qur'an dan as-sunnah serta digunakan secara nasional. Kiai dan ulama berbeda-beda asal-usulnya, tetapi memiliki karakter *fundamental* yang berkualitas tinggi dalam hal iman, taqwa dan ilmu sebagai ciri khas.

Gelar Kiai tidak diusahakan melalui jalur-jalur formal sebagai sarjana misalnya, melainkan datang dari masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh dari pihak luar (Qomar, 2005: 27-28).

Selain itu asal usul pesantren juga tidak terlepas dari sejarah Walisongo pada abad 15-16 yang ada di tanah jawa.

Salah seorang Walisongo yang terkenal adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Gujarat India, disebut sebagai pencipta pertama sekolah agama yang disebut sebagai pondok pesantren. Para wali yang lain seperti, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria dan lain-lain dalam menyebarkan ajaran Islam memang melakukan pengembaraan dari desa ke kota. Setelah para wali tersebut memperoleh pengikut yang banyak, dan menjadi terkenal karena ilmunya, maka di daerahnya masing-masing didirikanlah pusat pendidikan dimana para wali itu berdomisili (Usuludin, 2002: 30).

Pada masa awal kemunculannya, lembaga pendidikan pesantren bersifat sangat sederhana, yakni berupa pengajian al-qur'an dan tata cara beribadah yang diselenggarakan di masjid, surau atau rumah-rumah ustadz. Lembaga-lembaga yang kemudian berkembang dengan nama pesantren ini terus tumbuh dan berkembang didasari rasa tanggung jawab untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat dan generasi penerus (Dhofier, 1982: 44).

Pertumbuhan dan penyebaran pesantren yang sampai ke pelosok pedesaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyiaran agama Islam. Kaum muslimin berusaha mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam dengan sumber kekuasaan itu sendiri. Dalam usaha itu tidak sepenuhnya berhasil, namun juga tidak sepenuhnya gagal.

Yang pasti ada dalam berbagai variasinya, dunia pesantren merupakan pusat persemaian, pengalaman dan sekaligus penyebaran ilmu-ilmu keIslaman (Abdullah, 1995: 3).

3. Unsur Atau Komponen Pondok Pesantren

Hampir dapat dipastikan, lahirnya suatu pesantren berawal dari beberapa elemen yang selalu ada di dalamnya. Ada lima elemen pesantren, antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut meliputi kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran kitab-kitab klasik.

a. Kyai

Kyai adalah orang yang dipandang alim (pandai) dalam bidang agama Islam atau orang yang dianggap menguasai ilmu agama Islam yang memiliki atau menjadi pengasuh pondok pesantren (Dagun, 1997 : 498). Kyai atau pengasuh pondok pesantren merupakan elemen yang sangat esensial bagi suatu pesantren. Rata-rata pesantren yang berkembang di Jawa dan Madura, sosok kyai begitu berpengaruh, kharismatik dan berwibawa, sehingga amat disegani oleh masyarakat di lingkungan pesantren. Di samping itu, kyai pondok pesantren juga sekaligus sebagai penggagas dan pendiri dari pesantren yang bersangkutan. Oleh karenanya, sangat wajar jika dalam pertumbuhannya, pesantren sangat tergantung pada peran seorang kyai (Haedari, 2004 : 28).

b. Santri

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren, untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam melalui kitab-kitab kuning. Seorang ulama biasa disebut sebagai seorang kyai apabila memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut. Oleh karena itu, eksistensi kyai biasanya juga berkaitan dengan adanya santri di pesantrennya.

Pada umumnya, santri terbagi dalam dua kategori. Pertama, santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal (santri senior) di pesantren tersebut merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari. Kedua, santri kalong, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren. Mereka bolak-balik (nglajo) dari rumahnya sendiri. Para santri kalong berangkat ke pesantren ketika ada tugas belajar dan aktivitas pesantren lainnya (Haedari, 2004: 35).

c. Pondok

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama bagi

para santri atau siswa tersebut berada dalam lingkungan kompleks pesantren dimana guru bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar dan kegiatan-kegiatan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya santri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dhofier, 1985:44).

Pondok pesantren, asrama bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang dapat membedakan dengan system pendidikan yang lain. Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam buku “tradisi pesantren” (study tentang pandangan hidup kyai) ada tiga elemen utama kenapa pesantren harus menyediakan asrama, yaitu:

- 1) kemasyhuran seorang guru/kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang islam menarik para santri dari jauh untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri tersebut harus meninggalkan kampung halamannya dan menetap di dekat kediaman kyai.
- 2) hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedianya perumahan (akomodasi) yang cukup dapat menampung para santri. Dengan demikian perlu adanya suatu tempat yang khusus bagi para santri.

3) adanya sikap timbale balik antara kyai dan santri dimana para santri menganggap para kyainya seolah olah sebagai bapaknya sendiri. Sedangkan kyai menganggap para santri sebagai titipan (Allah) yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan suasana keakraban dalam memenuhi kebutuhan untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab dipihak kyai untuk menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Disamping itu dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya sehingga para kyai memperoleh imbalan dari para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga kyai (Dhofier, 1985:47-66).

d. Masjid

Masjid adalah bangunan yang didirikan sebagai tempat beribadah kepada Allah, khususnya untuk mengerjakan shalat (Dagun, 2006 : 623). Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jum'at serta pengajaran kitab-kitab Islam klasik (Dhofier, 1982 : 49).

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Artinya, telah terjadi proses berkesinambungan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan kaum muslim. Tradisi penggunaan masjid sebagai pusat aktifitas kaum muslim diteruskan oleh para sahabat dan khalifah seterusnya (Haedari, 2005 : 33). Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi ini. Para kyai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan disiplin para murid dalam mengerjakan kewajiban sembahyang lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban agama yang lain (Dhofier, 1982 : 49).

Kendatipun sekarang ini model pendidikan di pesantren mulai dialihkan di kelas-kelas seiring dengan perkembangan sistem pendidikan modern, bukan berarti masjid kehilangan fungsinya. Para kyai umumnya masih setia menyelenggarakan pengajaran kitab kuning di masjid. Pada sisi lain, para santri juga tetap menggunakan masjid sebagai tempat belajar, karena alasan lebih tenang, sepi, kondusif dan mengandung nilai ibadah (Haedari, 2005 : 34).

e. Pengajaran Kitab Klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama yang menganut paham Syafi'iyah, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama (Dhofier, 1982 : 50). Pada umumnya, para santri datang dari jauh dari kampung halaman dengan tujuan ingin memperdalam kitab-kitab klasik (kitab Ushul Fiqh, Fiqh, Tafsir, Hadits dan lain sebagainya). Para santri biasanya juga mengembangkan keahlian dalam berbahasa Arab guna menggali makna dan tafsir di balik teks-teks klasik tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memperdalam ilmu-ilmu yang berbasis pada kitab-kitab klasik.

Adapun metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren ialah sistem bandongan atau seringkali juga di sebut weton. Sedangkan metode yang lain adalah sistem sorogan yang diberikan kepada murid-murid yang telah menguasai pembacaan al-Qur'an. Pada awalnya sistem tradisional ini banyak dilakukan di masjid, langgar atau rumah-rumah kyai (Haedari, 2005 : 41).

Dalam sistem *bandongan*, sekelompok santri yang terdiri antara lima sampai dengan lima ratus orang mendengarkan sang kyai yang membacakan, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit dipahami. Kelompok kelas dari sistem *bandongan* ini disebut *halaqah*, yang arti bahasanya lingkaran murid atau sekelompok siswa yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Sedangkan metode *sorogan*, pada umumnya diberikan kepada para santri yang baru masuk dan memerlukan bimbingan secara individual (Dhofier, 1982 : 28).

4. Tujuan Pondok Pesantren

Pesantren dalam proses perkembangannya masih tetap disebut sebagai lembaga keagamaan yang mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamikanya pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan dakwah Islam.

Pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, yang pada umumnya menggunakan tujuan pendidikannya dengan jelas. Untuk mengetahui tujuan

pendidikan pesantren yang diselenggarakan pesantren, maka jalan yang harus ditempuh yaitu dengan pemahaman terhadap fungsi-fungsi pendidikan yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh pesantren.

Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsari Dhofier adalah: "tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati (Dhofier, 1982: 18).

Menurut Hasbullah tujuan terbentuknya pesantren dapat dibedakan menjadi 2 macam: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah membimbing manusia menuju kepribadian muslim, mengarahkan masyarakat melalui ilmu dan amal. Sedangkan tujuan khusus, untuk mempersiapkan santri menjadi alim ilmu agama, bermanfaat bagi diri dan lingkungannya (Hasbullah, 1985: 24-25). Sulthon dan Khusnurdilla (2005: 92) berpendapat bahwa tujuan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi

masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mandiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama/ menegakkan agama Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*izzul Islam wal muslimin*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

Pernyataan di atas, mungkin dimaksudkan agar santri termotivasi penuh kemandirian dan terampil (memiliki keahlian). Pada dasarnya tujuan pesantren belum terstruktur dan termaktub dalam garis-garis besar program kerja pesantren yang rinci, lengkap dan konsisten. Pada umumnya tujuan ini tergantung pada dua hal: pertama, bentuk atau plat-form pesantren. Kedua, terkait *concern* pengajaran pesantren, kepemimpinan Kiai dan orientasinya.

5. Fungsi Dan Peran Pondok Pesantren

Pesantren telah berpengalaman menghadapi berbagai corak masyarakat dalam rentang waktu. Pesantren tumbuh atas dukungan masyarakat, bahkan menurut Husni Rahim (2001: 152), pesantren berdiri didorong permintaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pesantren memiliki fungsi yang jelas.

Fungsi pesantren pada awal berdirinya sampai sekarang telah mengalami perkembangan visi, posisi dan persepsinya terhadap dunia luar telah berubah. Pesantren pada masa yang paling awal (masa Syaikh Maulana Malik Ibrahim)

berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam (Qomar, 2002: 22). Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah, sedang dakwah dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Jika ditelusuri akar sejarah berdirinya sebagai kelanjutan dari pengembangan dakwah, sebenarnya fungsi edukatif pesantren adalah sekedar membonceng misi dakwah. Misi dakwah Islamiyah inilah yang mengakibatkan terbangnya sistem pendidikan. Pada masa Walisongo, unsur dakwah lebih dominan dibanding unsur pendidikan. Fungsi pesantren pada kurun Walisongo adalah sebagai pencetak calon ulama dan *mubaligh* yang mulai dalam menyiarkan agama Islam (Qomar, 2002: 22).

Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat, pesantren bekerja sama dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Sejak semula pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan sosial masyarakat desa. Warga pesantren telah terlatih melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara santri dan masyarakat, antara kyai dan kepala desa. Oleh karena itu fungsi pesantren semula mencakup tiga aspek yaitu fungsi religious (*diniyyah*), fungsi sosial (*ijtima' iyyah*) dan fungsi edukasi (*tarbawiyyah*). Ketiga fungsi ini masih berlangsung

hingga sekarang. Fungsi lain adalah sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga pendidikan moral dan kultural. Di samping sebagai pendidikan, pesantren juga sebagai lembaga Pembina moral dan kultural, baik di kalangan para santri maupun santri dengan masyarakat. Kedudukan ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren lebih banyak menggunakan pendekatan kultural (Qomar, 2002: 23).